

Pengembangan Modul Pendidikan Pancasila berbasis *Problem Based Learning* Terintegrasi Nilai Antikorupsi

Irpan Suriadiata¹, Muhammad Syamsussabri², Nurmaningsih³

Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat, Indonesia

irpan.suriadiata@gmail.com¹, syamsussabri.edu@gmail.com², nurmaningsih.uinmtr@gmail.com³

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan modul pendidikan Pancasila berbasis *problem based learning* terintegrasi dengan nilai antikorupsi. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian pengembangan dengan menggunakan model pengembangan ADDIE dengan tahapan menganalisis (*analyze*), merancang (*design*), mengembangkan (*develop*), mengimplementasikan (*implement*), dan mengevaluasi (*evaluate*). Instrumen pengukuran kelayakan menggunakan angket dengan mengukur validitas materi oleh ahli materi terkait Pancasila, validitas bahan ajar oleh ahli bahan ajar, kepraktisan oleh dosen yang mengajarkan matakuliah pendidikan Pancasila, dan keterbacaan modul oleh mahasiswa. Hasil kelayakan modul secara keseluruhan memiliki persentase 96% dengan predikat sangat baik. Berdasarkan hasil ini dapat disimpulkan bahwa bahan ajar modul yang dikembangkan sangat layak untuk digunakan sebagai bahan ajar di perguruan tinggi.

Kata kunci: Modul; Pendidikan Pancasila; Problem Based Learning; Antikorupsi

Abstract: This study aimed to develop an integrated problem-based learning Pancasila education module with anti-corruption values. This research is included in development research using the ADDIE development model with the stages of analyzing, designing, developing, implementing, and evaluating. The instrument for measuring feasibility uses a questionnaire by measuring the validity of the material by material experts related to Pancasila, the validity of teaching materials by teaching materials experts, practicality by lecturers who teach Pancasila education courses, and the readability of modules by students. The overall module feasibility results have a percentage of 96% with a very good predicate. Based on these results, it can be concluded that the module teaching materials developed are very feasible to be used as teaching materials in universities.

Keywords: Module; Pancasila Education; Problem Based Learning; Anti-Corruption

A. Pendahuluan

Korupsi merupakan permasalahan yang di alami oleh setiap negara yang dampaknya sangat merugikan di semua sektor kehidupan. Pemerintah Indonesia memiliki pekerjaan berat untuk mengatasi kasus korupsi yang terjadi. Selama kurun Januari s/d Juni 2020 *Indonesia Corruption Watch* (ICW) menyebutkan, terdapat 169 kasus korupsi selama periode semester satu tahun 2020 dengan kerugian triliunan rupiah (ICW, 2020). Ini merupakan angka yang sangat besar dan tentunya akan berdampak di berbagai sektor kehidupan dan akan berdampak pula terhadap penilaian negatif masyarakat terhadap birokrasi pemerintahan.

Berdasarkan hasil Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) skor Indonesia sebesar 3,84 dari skala 0-5. Skor ini masih terbilang rendah dan jauh dari target yang diharapkan yaitu pada skala 4 sesuai target RPJMN 2020 (BPS, 2020) dan Indonesia masih berada pada urutan 96 dari 180 negara (Transparency International – The Global Coalition Against Corruption, 2017). Semakin tinggi skor IPAK tentunya semakin cenderung pula antikorupsi yang ada di masyarakat dan dampaknya sangat berpengaruh terhadap segala aspek. Dilihat dari dimensi persepsi menunjukkan masyarakat semakin permisif terhadap korupsi di tahun 2020, sedangkan pada dimensi pengalaman cenderung fluktuatif seperti yang terlihat pada (BPS, 2020).

Korupsi adalah penyalahgunaan wewenang yang dipergunakan untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri, keluarga, maupun kelompoknya. Tindakan korupsi bisa berakibat negatif pada pelaku, keluarga, maupun unit organisasi (DJPB, 2019). Terdapat 9 nilai antikorupsi diperkenalkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan disosialisasikan ke masyarakat sejak beberapa tahun lalu, di antaranya: 1) Kejujuran; 2) Kedisiplinan; 3) Kepedulian; 4) Tanggung jawab; 5) Kerja keras; 6) Kesederhanaan; 7) Kemandirian; 8) Keberanian; dan 9) Keadilan (KPK, 2020). Salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan perilaku korupsi di Indonesia dapat dilakukan dengan menguatkan nilai antikorupsi pada pelajar/mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa. Berdasarkan IPAK menurut karakteristik responden, semakin tinggi jenjang pendidikan maka semakin tinggi pula IPAK (BPS, 2020; KPK, 2020).

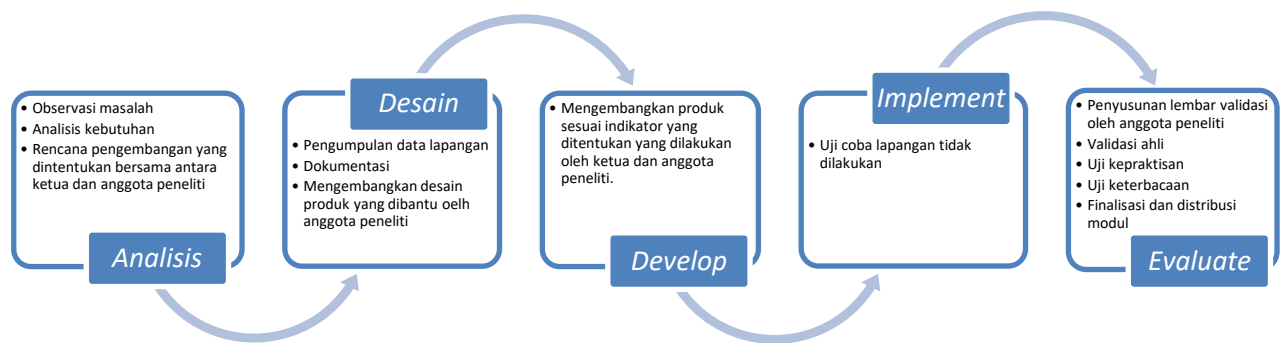
Upaya yang dilakukan yaitu dengan menanamkan nilai antikorupsi sedini mungkin kepada mahasiswa melalui bahan ajar modul matakuliah Pendidikan Pancasila. Bahan ajar mengacu pada jenis bahan apa pun yang digunakan dalam pembelajaran. Bahan ajar dapat dikategorikan menjadi buku ajar, modul, diktat, dan lainnya (Kemenristekdikti, 2017). Penentuan bahan ajar yang digunakan dalam pembelajaran diketahui melalui analisis kebutuhan bahan ajar. Kebutuhan terkait bahan ajar merupakan sesuatu yang sangat penting untuk dilakukan guna menemukan bahan ajar yang tepat dan mengakomodasi kegiatan belajar peserta didik/mahasiswa (Andi & Arafah, 2017; Gökhan Ulum, 2015; Ibrahim et al., 2016; Salam, 2017; Syamsussabri et al., 2018). Berdasarkan analisis kebutuhan lapangan menunjukkan bahwa modul merupakan bahan ajar yang cocok untuk mengakomodasi kebutuhan bahan ajar mahasiswa dan pendidik (Syamsussabri et al., 2021).

Modul merupakan bahan ajar cetak yang dirancang dan dilengkapi dengan petunjuk untuk dapat dipelajari secara mandiri oleh mahasiswa (Depdiknas, 2008). Modul adalah bahan ajar yang disusun sesuai dengan pokok bahasan, rancangan pembelajaran, dan disebarluaskan untuk digunakan dalam kegiatan pembelajaran (Kemenristekdikti, 2017). Modul yang akan dikembangkan akan mengikuti tahapan pengembangan ADDIE yang terdiri dari menganalisis

(*analyze*), merancang (*design*), mengembangkan (*develop*), mengimplementasikan (*implement*), dan mengevaluasi (*evaluate*) (Branch, 2009) yang dipadukan dengan model *Problem Based Learning* dengan alasan bahwa model ini sangat cocok untuk konteks dunia nyata (Syamsussabri et al., 2019), dapat menanamkan kemampuan abad 21 (Eggen & Kauchak, 2018) dan dapat diintegrasikan dengan nilai antikorupsi pada mahasiswa. Pengembangan modul ini sangat penting untuk dilakukan guna menunjang pembelajaran mahasiswa pada perguruan tinggi. Modul pendidikan Pancasila yang terintegrasi dengan nilai antokorupsi belum banyak dikembangkan, sehingga ini menjadi alternatif bahan ajar pendidikan Pancasila pada perguruan tinggi. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka perlu dilakukan penelitian dan pengembangan modul pendidikan Pancasila dengan model *problem based learning* guna menanamkan nilai antikorupsi pada mahasiswa dengan harapan dapat menjadi salah satu bahan ajar yang dapat dijadikan rujukan guna mencegah sedini mungkin perilaku korupsi di Indonesia.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian pengembangan dengan menggunakan model pengembangan ADDIE (*analyze, design, develop, implement, dan evaluate*). Lokasi penelitian berada di Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat. Teknik pengumpulan data berupa angket yang terdiri dari: (1) angket validasi materi oleh ahli materi pendidikan Pancasila, (2) angket validasi bahan ajar oleh ahli bahan ajar, (3) angket kepraktisan oleh dosen yang mengajarkan matakuliah pendidikan Pancasila, (4) angket keterbacaan yang dilakukan oleh mahasiswa sebanyak 50 orang. Angket disesuaikan dengan pedoman dan peraturan yang berlaku (BSNP, 2014; Depdiknas, 2008; Kemendikbud, 2016; Kemenrisetdikti, 2017). Diagram alir tahapan proses ilmiah penelitian sebagai berikut:



Gambar 1. Diagram Alir Tahapan Proses Penelitian

C. Temuan dan Pembahasan

Modul ini merupakan salah satu alternatif bahan ajar yang dapat digunakan siswa untuk memahami suatu materi tertentu (Depdiknas, 2008). Modul Pendidikan Pancasila disusun berdasarkan penanaman nilai-nilai anti korupsi. Materi modul yang disusun sesuai dengan materi pelajaran dan desain pembelajaran yang sistematis dan menarik. Hal ini memungkinkan siswa untuk belajar sendiri. Mempelajari cara menggunakan modul juga dapat memotivasi siswa dan meningkatkan keterampilan berpikir. Modul yang dirancang dengan menghadirkan contoh kehidupan nyata yang sejalan dengan kehidupan sehari-hari juga dapat memfasilitasi literasi siswa dan perolehan konsep baru (Syamsussabri et al., 2019). Modul dapat dikatakan layak

digunakan jika memenuhi persyaratan penerimaan kelayakan isi/materi, kelayakan desain materi, dan kelayakan magang pembelajaran, serta harus dibaca dengan baik oleh siswa (BSNP, 2014; Depdiknas, 2008; Kemendikbud; 2016, Kemenristek; 2017). Hasil perhitungan tersebut kemudian disesuaikan dengan kriteria sebagai berikut:

Tabel 1. Kriteria Modul

No	Persentase	Kriteria	Keterangan
1	0% - 54 %	Tidak Baik	Revisi
2	55% - 64%	Kurang Baik	Revisi
3	65% - 79%	Cukup Baik	Revisi
4	80% - 89%	Baik	Revisi
5	90% - 100%	Sangat Baik	Tidak Revisi

Modul pendidikan Pancasila berbasis *problem based learning* dengan Penanaman Nilai Antikorupsi Produk pengembangan hasil penelitian yang telah dilakukan menghasilkan modul ajar yang dengan nomor ISBN 978-623-96914-6-2. Modul juga sudah tercatat di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan nomor EC00202162626 seperti yang terlihat pada Gambar 2 dan Gambar 3. Hasil pelaksanaan penelitian ini sudah mencapai tahap validasi materi, validasi bahan ajar modul, kepraktisan, dan keterbacaan.



Gambar 2. Produk Hasil Penelitian. Modul Pendidikan Pancasila berbasis *Problem Based Learning* dengan Penanaman Nilai Antikorupsi

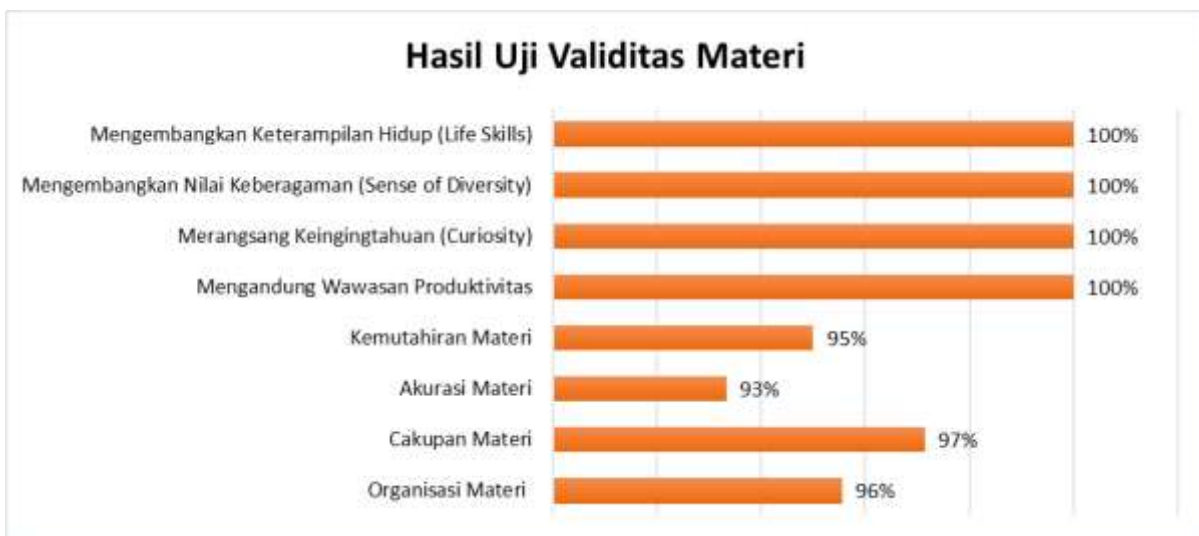


No.	Nama	Alamat
1.	DR. EFAS SURIHARTO, S.Pd., M.Pd.	Desa Sembada, Desa Sembada, Kecamatan Sembada, Kabupaten Karangasem, Bali, Indonesia, 80812
2.	DR. HANIKAH, S.Pd., M.Pd.	Desa Sembada, Desa Sembada, Kecamatan Sembada, Kabupaten Karangasem, Bali, Indonesia, 80812
3.	DR. HANIKAH, S.Pd., M.Pd.	Desa Sembada, Desa Sembada, Kecamatan Sembada, Kabupaten Karangasem, Bali, Indonesia, 80812

No.	Nama	Alamat
1.	DR. EFAS SURIHARTO, S.Pd., M.Pd.	Desa Sembada, Desa Sembada, Kecamatan Sembada, Kabupaten Karangasem, Bali, Indonesia, 80812
2.	DR. HANIKAH, S.Pd., M.Pd.	Desa Sembada, Desa Sembada, Kecamatan Sembada, Kabupaten Karangasem, Bali, Indonesia, 80812
3.	DR. HANIKAH, S.Pd., M.Pd.	Desa Sembada, Desa Sembada, Kecamatan Sembada, Kabupaten Karangasem, Bali, Indonesia, 80812

Gambar 3. Produk Hasil Penelitian. Hak Cipta Modul Pendidikan Pancasila berbasis Penanaman Nilai Antikorupsi

Validasi materi dilakukan oleh Ahli Materi dengan tujuan untuk mengetahui keabsahan dan kesesuaian isi modul/materi yang disiapkan siswa dengan kemampuan dasar yang ingin dicapai. Lembar verifikasi materi modul ini terdiri dari beberapa indikator seperti yang terlihat pada Gambar 4.



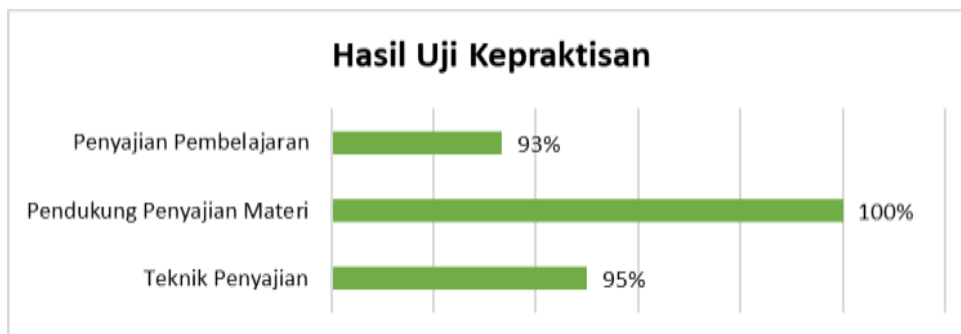
Gambar 4. Hasil Uji Validitas Materi Modul Pendidikan Pancasila. Pengembangan modul sudah melakukan beberapa kali revisi sehingga produk akhir menghasilkan skor di atas 93% dengan predikat sangat baik. Revisi dilakukan dengan menyesuaikan kedalaman materi dengan RPS. Dari sisi materi modul ini sudah relevan dengan materi pendidikan Pancasila untuk di ajarkan di perguruan tinggi.

Validasi modul dilakukan oleh ahli modul dengan tujuan untuk mengetahui validitas dan kesesuaian desain modul yang digunakan oleh mahasiswa. Lembar validasi bahan ajar modul ini terdiri dari beberapa indikator seperti yang terlihat pada Gambar 5.



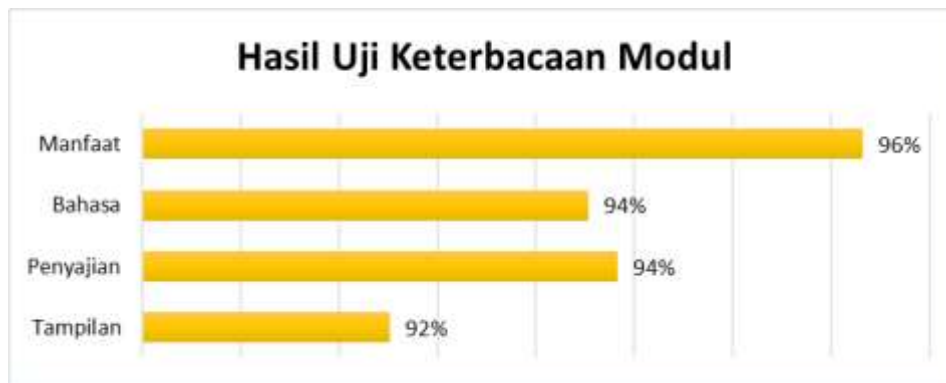
Gambar 5. Hasil Uji Validitas Bahan Ajar Modul. Hasil revisi menghasilkan skor validitas di atas 91% dengan predikat sangat baik. Revisi dilakukan dari sisi tampilan modul. Dari sisi bahan ajar, modul ini sudah layak untuk digunakan di perguruan tinggi.

Uji kepraktisan modul dilakukan oleh mahasiswa yang mengikuti matakuliah pendidikan Pancasila sebanyak 50 orang. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui kegunaan modul yang digunakan dalam kegiatan belajar siswa. Kegiatan pembelajaran yang disusun sesuai dengan metode dan model pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran. Kegiatan pembelajaran yang ditempatkan dalam modul perlu dipraktikkan secara mandiri oleh siswa dan dapat dikembangkan (Bradley & Brown, 2006). Penempatan kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik lebih mudah diterapkan karena lebih konsisten dan logis. Pada modul ini digunakan model *Problem Based Learning* (PBL). Hasil uji kepraktisan dapat dilihat pada Gambar 6.



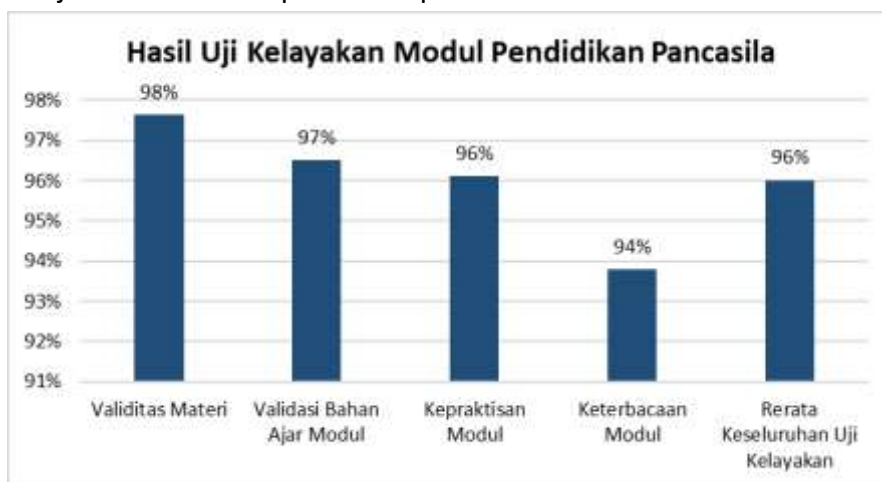
Gambar 6. Hasil uji kepraktisan modul. Hasil revisi menunjukkan bahwa skor kepraktisan berada di atas 93% dengan predikat sangat baik. Skor ini menunjukkan bahwa dari segi kepraktisan, modul ini sangat praktis dan dapat digunakan sebagai bahan ajar di perguruan tinggi.

Uji keterbacaan modul bertujuan untuk mengetahui tingkat keterbacaan siswa terhadap modul baik itu dari segi indikator seperti yang terlihat pada Gambar 5. Keterbacaan modul ini sangat penting diukur karena untuk mengukur kesesuaian kemampuan siswa dalam menggunakan modul sebagai salah satu alternatif bahan ajar. Hasil uji keterbacaan modul dapat dilihat pada Gambar 7.



Gambar 7. Hasil uji keterbacaan modul pendidikan Pancasila. Hasil uji keterbacaan menunjukkan bahwa skor keterbacaan rata-rata di atas 92% dengan predikat sangat baik. Skor ini menunjukkan bahwa dari segi keterbacaan modul yang dikembangkan dapat digunakan dan terbaca dengan baik oleh mahasiswa.

Rerata persentase uji kelayakan berupa uji validasi materi, uji validasi bahan ajar modul, uji kepraktisan, dan uji keterbacaan dapat dilihat pada Gambar 8.



Gambar 8. Hasil uji kelayakan modul pendidikan Pancasila. Hasil menunjukkan bahwa secara keseluruhan kelayakan modul memiliki skor 96% dengan kriteria sangat baik. Hasil ini menunjukkan bahwa modul pendidikan Pancasila yang dikembangkan sudah layak dan dapat digunakan sebagai salah satu bahan ajar di perguruan tinggi.

D. Simpulan dan Saran

Hasil kelayakan modul memiliki persentase 96% dengan predikat sangat baik. Hasil ini menunjukkan bahwa modul pendidikan Pancasila yang yang dikembangkan sangat layak untuk digunakan sebagai bahan ajar di perguruan tinggi. Penelitian selanjutnya perlu dikaji terkait penerapan modul terhadap aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik mahasiswa serta perlu dikaji lebih mendalam terkait metode terbaru dalam menumbuhkan karakter dan nilai Pancasila untuk menumbuhkan nilai antikorupsi di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Andi, K., & Arafah, B. (2017). Using Needs Analysis to Develop English Teaching Materials in Initial Speaking Skills for Indonesian College Students of English. *The Turkish Online Journal of Design, Art, and Communication*, 419–437.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2020). *Persepsi Masyarakat Terhadap Korupsi*. Badan Pusat Statistik.

- Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). (2014). *Instrumen Penilaian Buku Teks Pelajaran*. Badan Standar Nasional Pendidikan.
- Bradley, B. W., & Brown, R. T. (2006). *Assesing Process Skills*. Exploratorium.
- Branch, R. M. (2009). *Instructional Design: The ADDIE Approach*. Springer.
- Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas). (2008). *Penulisan Modul*. Departemen Pendidikan Nasional.
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan (DJPB). (2019). *Nilai Antikorupsi*. <http://djpb.kemenkeu.go.id/>
- Eggen, P., & Kauchak, D. (2018). *Strategies and Models for Teachers: Teaching Content and Thinking Skills*. Pearson Education.
- Gökhan Ulum, Ö. (2015). A Needs Analysis Study for Preparatory Class ELT Students. *European Journal of English Language Teaching*, 1(1), 14–22. <https://doi.org/10.5281/zenodo.51774>
- Ibrahim, Z., Alias, N., & Nordin, A. B. (2016). Needs analysis for graphic design learning module based on technology & learning styles of deaf students. *Cogent Education*, 3(1). <https://doi.org/10.1080/2331186X.2016.1178364>
- Indonesian Corruption Watch (ICW). (2020). *Kasus Korupsi Sepanjang 2020*. <https://www.antikorupsi.org/>
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2016). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Buku Yang Digunakan oleh Satuan Pendidikan*. http://simpuh.kemenag.go.id/regulasi/permendikbud_08_16.pdf
- Kementerian Riset, T. dan P. T. R. I. (Kemenristekdikti). (2017). *Panduan Penyusunan Perangkat Pembelajaran & Bahan Ajar*. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2020). *Nilai Anti Korupsi*. <https://aclc.kpk.go.id/>
- Salam, S. (2017). Developing Needs Analysis Based-Reading Comprehension Learning Materials: A Study on the Indonesian Language Study Program Students. *Advances in Language and Literary Studies*, 8(4), 105. <https://doi.org/10.7575/aiac.all.v.8n.4p.105>
- Syamsussabri, M., Sueb, & Suhadi. (2019). Kelayakan Modul Pencemaran Lingkungan Berbasis Environmental Worldview dan Environmental Attitudes. *Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, Dan Pengembangan*, 4(9), 1207–1212. <http://journal.um.ac.id/index.php/jptpp/>
- Syamsussabri, M., Sueb, & Suhadi. (2018). Need Analysis of Materials and Media Biology Teaching for High School Students Around the Location of People Gold Mining. *International Conference on Mathematics and Science Education (ICoMSE)*, 175–180. <http://icomse.fmipa.um.ac.id>
- Syamsussabri, M., Suhadi, & Sueb. (2019). The Effect of Environmental Pollution Module on Environmental Worldview in Senior High School. *Journal of Physics: Conference Series*, 1417(1), 012076. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1417/1/012076>
- Syamsussabri, M., Suriadiata, I., & Nurmaningsih. (2021). Analisis Kebutuhan Pengembangan Bahan Ajar Pendidikan Pancasila. *IJERT: Indonesian Journal of Education Research and Technology*, 1(2), 29–35.
- Transparency International, The Global Coalition Against Corruption. (2017). *Corruption Perceptions Index*. <https://www.transparency.org/en/news/corruption-perceptions-index-2017#>